

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pada bagian Landasan Teori ini diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pemerintah. Teori PAD didefinisikan sebagai penjelasan mengenai pengertian PAD dan penjabaran elemen-elemen yang terdapat dalam PAD.

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber penerimaan PAD harus dioptimalkan untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah otonom. Kemandirian daerah otonom diukur melalui seberapa besar peranan PAD dalam membiayai pengeluaran daerah, khususnya belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD maka dapat dikatakan semakin tinggi tingkat

kemandirian daerah sehingga ketergantungan dana dari pemerintah pusat semakin kecil begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD semakin besar ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

2.1.1.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V pasal 6, terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain lain PAD yang sah.

Sumber pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 25 tahun 1999, sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu unsur PAD yang mencakup pajak asli daerah dan pajak Negara yang diserahkan kepada daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah meliputi

pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air permukaan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bagian dari PAD, sebagaimana di atur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta PP No. 20 tahun 1997. Menurut UU tersebut, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tarif yang dikenakan, kualitas dan kuantitas jasa pelayanan yang diberikan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas jasa pelayanan tersebut. Selanjutnya untuk pelaksanaan di masing-masing daerah, pungutan retribusi daerah dijabarkan dalam bentuk peraturan daerah. Hasil retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, penjualan saham milik daerah dan retribusi perijinan tertentu.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain adalah bagian PAD yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba BUMD. Termasuk dalam penerimaan ini, antara lain : penerimaan sewa rumah dinas milik daerah dan hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, penerimaan cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan biaya pembinaan pengawasan tempat pelelangan ikan, penerimaan setoran cicilan utang, penerimaan setoran biaya pembinaan lembaga keuangan desa, penerimaan biaya untuk mengikuti prakualifikasi dan lain-lain.

Sumber-sumber PAD di atas memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap penerimaan PAD secara keseluruhan. Namun demikian kontribusi terbesar dalam menyumbang penerimaan PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai sumber utama PAD, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik (BPS Provinsi NTT). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan

jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. Untuk menghitung PDRB, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Produksi

PDRB merupakan jumlah Nilai Tambah Bruto (NTB) atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah/region dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan NTB adalah Nilai Produksi Bruto (NPB/Output) dari barang dan jasa tersebut dikurangi seluruh biaya antara yang digunakan dalam proses produksi.

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha, yaitu :

- a. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas, dan Air Minum
- e. Konstruksi/bangunan
- f. Perdagangan, Restoran dan Hotel
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- i. Jasa-Jasa Termasuk Jasa Pelayanan Pemerintah

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB adalah jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah/region dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Berdasarkan pengertian tersebut, maka NTB adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB ini termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung neto.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor), di dalam suatu wilayah/region dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan metode ini, penghitungan NTB bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. PDRB merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PAD, dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2006:20). Menurut Boediono (Husna, 2015:22) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Menurut Nugreheni (Husna, 2015:22-23), pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain:

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB), atau ditingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan.

2. Produk Domestik Bruto Perkapita atau Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Bruto Perkapita atau Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara atau suatu daerah yang bersangkutan, atau disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata.

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 Pasal 18 pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Serta pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus belanja pemerintah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program yang termasuk belanja tidak langsung :

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja bunga
- c) Belanja subsidi
- d) Belanja hibah
- e) Bantuan sosial
- f) Belanja bagi hasil

g) Bantuan keuangan

h) Belanja tidak terduga.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah yang diambilnya. Santosa dan Rahayu (2005) menjelaskan ada tiga pos utama dalam pengeluaran pemerintah :

1. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
3. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

Dalam teori makro mengenai pengembangan pengeluaran pemerintah oleh para ahli ekonomi dapat digolongkan kedalam tiga golongan yaitu yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman (Guritno, 1993 :170-175)

2.1.4. Pengaruh PDRB Terhadap PAD

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah yang diyakini merupakan indikator dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan PDRB. PDRB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut dalam satu tahun tertentu, barang dan jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di Negara tersebut (Sukirno, 2003:33). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan

pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (Saragih, 2003:67). Hubungan yang jelas antara PDRB dan PAD, merupakan hubungan fungsional karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatkan PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktifitasnya (Santoso dan Rahayu, 2005:10-11).

Nilai PDRB atau pendapatan perkapita diperoleh dari berbagai pendapatan nasional bruto atau pendapatan domestik bruto pada suatu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang-barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian (Todaro, 2006:20). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai

pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah. Maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

2.1.5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PAD

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam teori makro mengenai perkembangan pemerintah dapat digolongkan ke dalam tiga golongan (Guritno, 1993 :170-175).

1. Model Pembangunan Terhadap Perkembangan Pemerintah

Teori ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Rostow dan Musgrave menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah tersebut, maka disimpulkan bahwa dengan meningkatnya infrastruktur misalnya investasi maka kegiatan ekonomi

juga akan meningkat. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, potensi pajak yang didapat pemerintah daerah akan bertambah banyak dan bervariasi yang nantinya berpengaruh pada peningkatan PAD.

2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori yang masih sejalan dengan Rostow dan Musgrave yaitu mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Teori tersebut disebut juga sebagai Hukum Wagner yang menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan "*The Law of Expanding State Expenditure*". Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman, Jepang). Dari hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan. Ketika pendapatan meningkat maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. Masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri akan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pajak daerah (Guritno, 1993: 172). Dalam hal ini pengeluaran pemerintah nantinya akan berpengaruh pada peningkatan PAD.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman yang juga mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori mereka didasari pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock

dan Wiseman adalah dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dengan demikian, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang akan menjadi semakin besar (Guritno, 1993:175)

2.2. Studi Terkait

Datu (2012) telah melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Makassar periode 1999-2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda (variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah dan PDRB). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan (1) variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Makassar (2) variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Makassar.

Rani (2015) telah melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (studi kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah, PDRB, dan jumlah penduduk). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan (1) variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan (2) variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan (3) variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan.

Asmuruf, Rumat dan Kawung (2015) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di kota Sorong tahun 2000-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda melalui dua variabel yaitu pendapatan dan jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan (1) variabel PDRB tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Sorong, (2) variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kota Sorong

Ema (2013) telah melakukan penelitian mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (Studi kasus di kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat tahun 1995-2010). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan melakukan uji MWD menunjukkan bahwa model linear merupakan model yang tepat digunakan dalam

penelitian ini (variabel yang digunakan adalah PDRB, investasi, dan pengeluaran pemerintah). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan (1) variabel PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah kabupaten Kapuas Hulu (2) variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah kabupaten Kapuas Hulu (3) variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah kabupaten Kapuas Hulu (4) variabel PDRB, variabel investasi, dan variabel pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah kabupaten Kapuas Hulu.

Chakim (2011) telah melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di kabupaten Madiun tahun 1991-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda (variabel yang digunakan yaitu jumlah penduduk, PDRB dan pengeluaran pemerintah). Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan (1) variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Madiun, (2) variabel PDRB berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Madiun, (3) variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Madiun, (4) ketiga variabel secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Madiun.